



STRATEGI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA SDIT IMAM SYAFI'I MENJADI SEKOLAH FAVORIT

Nurhakim Waras, Fiki Naoval, Hafid Irham

IAI An Nur Lampung

nurhakimwaras@gmail.com, fikinaoval@gmail.com, hafid.irham79@gmail.com

Abstract

Strategy is an individual or group effort to create a scheme in order to achieve the intended targets. achieve the expected goals. Included in the strategy of raising funds for financing education at SDIT Imam Syafi'i Petanahan. Education financing is often considered to be the main problem to encourage private schools to become excellent schools. This study wants to examine the education financing strategy carried out by one of the leading schools. The study is based on a case study of SDIT Imam Syafi'i Petanahan. This study found an educational financing model that was able to make SDIT Imam Syafi'i Petanahan become a favorite school among the Petanahan community in particular, and the Kebumen community in general. Based on this school's experience, parental participation in education financing must be balanced by providing quality assurance to education consumers.

Keywords: *Strategy, Education Financing, Favorite School*

Abstrak

Strategi adalah upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak dituju, dengan kata lain, strategi adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan. Termasuk dalam strategi penggalan dana untuk pembiayaan Pendidikan di SDIT Imam Syafi'i Petanahan. Pembiayaan pendidikan sering dianggap menjadi masalah utama untuk mendorong sekolah swasta menjadi sekolah unggulan. Penelitian ini ingin mengkaji strategi pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh salah satu sekolah unggulan. Kajian didasarkan pada studi kasus terhadap SDIT Imam Syafi'i Petanahan. Kajian ini menemukan model pembiayaan pendidikan yang mampu mengantarkan SDIT Imam Syafi'i Petanahan

menjadi sekolah favorit dikalangan masyarakat Petanahan khususnya, dan masyarakat kebumen pada umumnya. Berdasarkan pengalaman sekolah ini, partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan harus diimbangi dengan memberikan jaminan kualitas terhadap konsumen pendidikan.

Kata kunci: *Strategi, Pembiayaan Pendidikan, Sekolah Favorit*

PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Belakangan ini upaya pengembangan pendidikan dalam roda kehidupan merupakan suatu keharusan dan kewajaran. Dikatakan sebagai suatu keharusan, karena pendidikan sangat berperan sebagai bentuk untuk mengembangkan sumber daya manusia. Disebut sebagai suatu kewajaran, karena kehadiran pendidikan yang merupakan suatu produk budaya masyarakat dan bangsa, yang terus berkembang untuk mencari karakternya yang paling cocok, sesuai dengan perubahan dinamis yang terjadi di dalam masyarakat setiap bangsa (fleksibel).

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga) yang dianggap penting adalah masalah tentang pembiayaan, pembiayaan merupakan unsur yang mutlak harus tersedia. Sebagai contoh Pemerintah Republik Indonesia sesuai amanat Undang- Undang setiap tahunnya telah mencanangkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), demikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah. Dalam konteks lembaga atau organisasi, sekolah setiap tahun menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menunjukkan bagaimana perencanaan pendapatan dan Penggunaan biaya untuk keperluan operasional sekolah. Penggunaan biaya tersebut menggambarkan pola pembiayaan dalam pendidikan. Dengan demikian pada semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya. Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat.

Oleh karena itu, perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan, yang terdiri dari biaya operasional, biaya

investasi dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya-biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen, Negara Indonesia memberikan amanat kepada pemerintah untuk menetapkan anggaran pendidikan 20% dari anggaran belanja negara seperti tertuang pada pasal 31 Ayat 4. Pendidikan diibaratkan sebagai suatu kereta yang ditarik kuda, artinya keberhasilan proses pendidikan merupakan kontribusi dari lintas sektoral yaitu tenaga kerja, industri ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Sumber pendanaan pendidikan disekolah swasta sejauh ini beragam, bukan hanya dari pemerintah melainkan dari keluarga siswa dan masyarakat. Dasar perhitungan biaya pendidikan selama ini lebih didasarkan pada sumber-sumber anggaran pemerintah (rutin dan pembangunan), dengan agak mengabaikan kontribusi dan peran serta keluarga. Padahal hanya dengan kontribusi dari keluarga dan sumber-sumber non pemerintah tersebut, proses pendidikan dapat berlangsung meskipun dana pemerintah berkurang. misalnya, ketika dana DAU (Dana Alokasi Umum) belum cair dan sekolah harus menyelenggarakan Ujian, maka sekolah memperoleh dana itu dari sumber-sumber non-pemerintah termasuk dari keluarga siswa. Setelah adanya kebijakan nasional pemberian bantuan operasional Sekolah (BOS) bagi semua siswa usia wajib belajar pendidikan dasar (WAJARDIKDAS) di Indonesia, maka sekolah tidak diizinkan lagi menarik biaya pendidikan dari siswa. Kebijakan pendidikan gratis ini pada prakteknya justru menyulitkan sekolah swasta untuk berkembang. Akibat dari kebijakan ini, mau tidak mau ada beberapa inisiatif satuan pendidikan dalam mensikapi dana BOS dan konsekwensinya. Ada sekolah swasta yang menerima BOS dan tidak lagi memungut SPP dari siswa, ada sekolah swasta yang menerima BOS dan memungut biaya tambahan, bahkan ada yang ekstrim menolak BOS.

Berdasarkan konteks masalah di atas, kajian ini ingin mengungkap bagaimana respon sekolah swasta terhadap kebijakan pendidikan gratis yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini, dan bagaimana sebaiknya sekolah swasta mengelola biaya pendidikan. Untuk menjawab hal tersebut, maka penelitian ini mencoba menelaah beberapa penelitian yang telah penulis lakukan sebelumnya, dan secara khusus dihubungkan dengan kasus SDIT Imam Syafi'i Petanahan Kebumen. Sekolah swasta ini dipilih karena dianggap berhasil dalam mengatasi problema pembiayaan, bahkan SDIT Imam Syafi'i Petanahan Kebumen dianggap unggul di Kecamatan Petanahan Pada Khususnya, dan Kabupaten Kebumen pada umumnya. Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi dan jalan keluar bagi sekolah swasta di tengah kebijakan

pendidikan gratis yang dikembangkan pemerintah. Strategi ini diakui tidak bisa diterapkan di semua sekolah swasta, karena pembiayaan pendidikan disatukan sekolah swasta sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi lingkungannya. Bagi sekolah swasta yang mengagagas keunggulan, maka tulisan ini bisa menjadi inspirasi, hal ini penting mengingat prosentase sekolah swasta di Indonesia besar sekali, yaitu mencapai 92 %.

Ada beberapa dasar penghitungan satuan biaya (unit cost) pendidikan dalam berbagai kepustakaan yang ada. Beberapa dasar penghitungan satuan biaya itu antara lain: penghitungan berdasarkan biaya langsung (*direct cost*), biaya tidak langsung (*indirect cost*); penghitungan berdasarkan biaya pribadi (*privat cost*) dan biaya sosial (*social cost*); atau penghitungan berdasarkan biaya dalam bentuk uang (*monetary cost*) dan bukan uang (*nonmonetary cost*). Di samping itu ada juga model penghitungan biaya tetap (*ixed cost*) dan biaya tidak tetap (*variable cost*); biaya investasi dan biaya operasional; biaya total (*Total cost*) dan biaya satuan (*Unit cost*). Dari beberapa teori di atas, *penelitian ini memilih pendekatan analisis biaya total (total cost) dan biaya satuan (unit cost)*.

Dalam hal pembiayaan pendidikan ini, Fattah (2001) menjelaskan bahwa biaya yang rendah berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Sekolah dan proses pembelajaran serta kualitas *out comes* yang dihasilkan. Artinya ada korelasi yang positif antara besarnya biaya pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di Sekolah. Oleh karena itu perencana pendidikan harus menggunakan sebaik mungkin sumber daya yang tersedia, mengawasi penggunaan sumber daya yang ada terhadap permintaan atas sumber daya tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan itu, maka penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Kasus yang diambil adalah pembiayaan pendidikan di Sekolah swasta, yaitu Sekolah Islam Terpadu (SDIT) Imam Syafi'i Petanahan Kebumen. Sekolah Islam Terpadu dipilih karena Sekolah swasta ini berhasil mengatasi problema pembiayaan, bahkan Sekolah itu dianggap unggul di sekitar Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. Untuk memperkaya data, peneliti menggunakan perbandingan data dengan beberapa penelitian tentang pembiayaan pendidikan yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

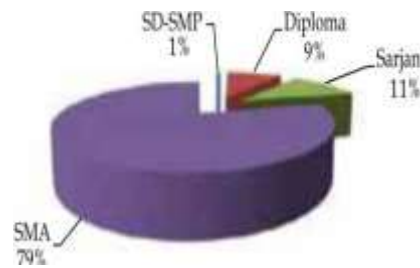
SEKOLAH ISLAM TERPADU IMAM SYAFI'I (SDIT): MEMBIDIK SEMUA LAPISAN MASYARAKAT

SDIT Imam Syafi'i Petanahan Kebumen merupakan sekolah favorite di Kecamatan Petanahan Pada Khususnya. Di tengah fenomena ketertinggalan sekolah

swasta dibandingkan sekolah umum yang berlokasi di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dan berstatus sebagai sekolah swasta, sekolah tersebut berhasil keluar dari gambaran sekolah yang serba tertinggal dan membuktikan diri menjadi lembaga pendidikan yang berhasil. Sekolah Islam Terpadu (SDIT) berhasil menempatkan diri menjadi sekolah yang diminati oleh semua lapisan masyarakat di Kecamatan Petanahan pad khususnya, dan Kabupaten Kebumen pada umumnya. Kenapa kami menyebut konsumen Sekolah ini adalah semua lapisan masyarakat?, hal ini saya simpulkan dari kemampuan orang tua membayar biaya pendidikan pada Sekolah tersebut. Untuk tahun 2021 uang pangkal yang harus dibayarkan orangtua siswa kepada sekolah sebesar Rp. 2.350.000,00 jumlah yang cukup besar untuk ukuran biaya pendidikan jenjang sekolah dasar. Untuk menggambarkan konsumen atau peminat dari Sekolah Islam terpadu, berikut penulis paparkan data deskripsi latar belakang keluarga siswa. Berdasarkan data penerimaan siswa baru pada tahun 2022, menunjukkan bahwa semua ruang kelas sebanyak 14 ruang terisi penuh. Mengikuti prasyarat Sekolah Standar nasional (SSn) yang mensyaratkan jumlah anggota tiap rombel yang ideal adalah 28 anak. Sekolah ini kami nilai telah berhasil dari sisi-sisi tertentu menjadi sekolah yang diminati oleh masyarakat. Keberhasilan Sekolah Islam Terpadu (SDIT) ini menarik perhatian semua lapisan masyarakat, hal ini meruapakan suatu fenomena baru, dan barangkali bisa dikatakan suatu model atau trend baru dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sengaja dalam penelitian ini kami memilih obyek sebuah institusi pendidikan, yaitu fenomena Sekolah Islam Terpadu (SDIT) sebagai jendela untuk memahami realitas sekolah secara lebih luas di Indonesia.

Dilihat dari kelas ekonomi keluarga siswa Sekolah Islam Terpadu, diketahui bahwa sebagian besar (mayoritas) orang tua siswa berasal dari keluarga berkategori menengah. hal ini dapat ditunjukkan dengan indikator kemampuan orang tua dalam memenuhi prasyarat untuk menjadi siswa yang harus membayar uang daftar ulang sebesar Rp. 3.640.000,00 (Putra), Rp. 3.645.000,00 (Putri). Dari data di sekolah tersebut (lihat tabel), diketahui bahwa orang tua yang berpendapatan kurang dari satu juta ternyata 20 %, dari orang tua dengan pendapatan antara 1 juta sampai dengan 5 juta terdapat 78%; dari orang tua berpendapatan di atas 5 juta sebanyak 2%. Diduga, dibalik data tersebut masih banyak orang tua yang berpendapatan di atas 5 juta atau bahkan 20 juta. Dari pendataan ini tidak terpetakan variasi diantara orang tua yang berpendapatan diatas 5 juta, karena budaya masyarakat kita belum terbiasa menyebutkan pendapatan riil mereka setiap bulan.

Gambar 1.



Sumber: Data Sekolah Islam Terpadu, tahun 2022

Dilihat dari latar belakang pendidikan orang tua siswa dapat disebutkan mayoritas orang tua siswa berpendidikan sarjana baik itu Strata satu (S1), Strata Dua (S2) maupun Strata tiga (S3). Data menunjukkan orang tua berpendidikan SMA ke atas sebanyak 78.7 %; orang tua berlatar belakang pendidikan Sarjana sebanyak 11.5%; sedangkan orang tua berpendidikan Diploma ke bawah sebanyak 9.8 %. Ini menunjukkan bahwa orang tua peminat terhadap Sekolah Islam yang sebagian besar berpendidikan SMA ke atas menunjukkan bahwa pilihan tersebut telah didukung oleh tingkat rasionalitas dan pendidikan yang memadai.

STRATEGI PEMBIAYAAN

Ketika sebagian besar Sekolah untuk kejelasan sumber pembiayaan pendidikan berlomba mengusulkan diri menjadi sekolah negeri, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Imam Syafi'i yang beralokasi di Desa Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen ini justru mengambil langkah sebaliknya. Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) memilih untuk tetap menjadi Sekolah dengan status swasta. Untuk alasan kemandirian, status kelembagaan yang swasta dianggap lebih strategis dan menantang. Karena dengan begitu, para pengelola bisa memasang target sekaligus berimprovisasi dalam pencapaian target tertentu.

Menghadapi kebijakan pemerintah terkait pendidikan gratis dan implementasi pembiayaan oleh pemerintah daerah yang bernuansa diskriminatif ini, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Imam Syafi'i yang berdiri pada tahun 2009 tidak patah semangat, justru keadaan itu dijadikan cambuk untuk membuktikan bahwa sekolah tetap bisa survive ditengah keadaan yang menghimpit. Kenyataannya, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) tidak saja berhasil mengatasi persoalan pembiayaan pendidikan, namun juga berhasil membuktikan diri menjadi sekolah favorit, bahkan di Kabupaten Kebumen.

Menurut para pengelola Sekolah ini mengelola lembaga pendidikan dan menjadikan sekolah unggulan sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa tergantung kepada negara. Walau tidak dipungkiri Sekolah Dasar Islam Terpadu

menerima juga dana BOS dan bantuan dana pendidikan yang diberikan Dinas Pendidikan. Sekolah perlu mengerahkan segenap kemampuan untuk menjadi lembaga pendidikan yang mandiri dan berani bersikap dalam kondisi apapun. Di tengah kebijakan pemerintah yang menggratiskan biaya sekolah kepada siswa, Sekolah Dasar Islam Terpadu justru menarik biaya dari siswa dan bahkan menarik SPP lebih tinggi dibandingkan Sekolah sederajat di sekitarnya. Akibat dari kebijakan ini, ternyata Sekolah justru semakin diminati masyarakat dan penerimaan siswa setiap tahunnya selalu penuh.

Menaikkan biaya pendidikan pada satuan lembaga pendidikan biasanya mempunyai konsekwensi tertentu bagi satuan pendidikan tersebut. Hal ini disadari betul oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Imam Syafi'i, menyadari implikasi tersebut, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Imam Syafi'i memilih menjadi sekolah swasta. Dengan menjadi sekolah swasta, maka Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Imam Syafi'i, bisa menentukan harga, dan biaya pendidikan yang ditawarkan. Kutipan berikut ini nampak sekali mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan pendidikan bermutu maka lembaga pendidikan ini sejak awal menerapkan biaya yang lebih tinggi. Strategi biaya lebih tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan ini adalah strategi yang biasa diambil oleh sekolah swasta.

Ibu Anifiyah, seorang guru yang telah mengajar di sekolah selama 13 tahun, yaitu sejak tahun 2009 bercerita bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Imam Syafi'i sejak awal didirikan untuk menjadi sekolah yang bermutu. Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Imam Syafi'i sejak awal, mengingat statusnya yang swasta, menetapkan biaya yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa sekolah di sekelilingnya. Namun setelah dijelaskan maksudnya, keberatan itupun sirna. Sementara masyarakat luar wilayah yang menyekolahkan anaknya ke SDIT Imam Syafi'i justru kebanyakan dari para pegawai atau pengusaha swasta. Biaya yang sedikit mahal tidak lagi menjadi soal bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Imam Syafi'i.

Dari cerita di atas, ada beberapa poin bisa digaris bawahi terkait dengan kebijakan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Imam Syafi'i mengembangkan sekolah yang mandiri dan mampu berkontestasi dalam konteks globalisasi. *Pertama*, bahwa sekolah ini sejak awal memang telah digagas untuk menjadi sekolah yang lebih bermutu. *Kedua*, untuk meraih mutu yang diinginkan, Sekolah ini menetapkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya sekolah disekitarnya. Ini nampaknya terkait juga dengan kebijakan kenapa sekolah ini memilih berstatus swasta, tidak mau dijadikan sekolah negeri. *Ketiga*, perkembangan sekolah ini banyak didukung oleh peran masyarakat yang justru berasal dari kalangan pegawai swasta, di mulai masyarakat sekitar di luar komplek sekolah hingga masyarakat secara lebih luas. *Keempat*, sekolah ini semakin

meningkat jumlah peminatnya ketika sekolah ini mulai melakukan usaha promosi atau membangun image melalui pemunculan kegiatan siswa diluar sekolah.

Dari berbagai pertimbangan itu, akhirnya Sekolah Dasar Islam Terpadu dalam masalah pembiayaan pendidikan menerapkan strategi: 1) Daftar Ulang Siswa. Dana itu nantinya dialokasikan untuk Operasional dan kebutuhan peserta didik di sekolah. 2) SPP bulanan dari peserta didik. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) merupakan iuran rutin sekolah yang mana pembayarannya dilakukan setiap satu bulan sekali. Uang SPP di SDIT Imam Syafi'i lebih dominan untuk memenuhi Pemberian honor guru, membantu operasional sekolah. 3) Infaq setiap hari senin setelah selesai upacara. Infaq hari senin ini bertujuan untuk melatih peserta didik, dan menumbuhkan sikap derma kepada peserta didik. Teknisnya setelah upacara selesai petugas memanggil setiap kelasnya untuk maju menginfakkan, bagi yang tidak infaq tidak masalah dan ini ditanamkan kepada peserta didik. Alokasi dana ini untuk kegiatan sosial seperti kunjungan anak-anak yang sakit atau guru dan karyawan yang sakit, siswa dijenguk secara umum, SOP nya adalah Ketika sakit sudah 3 hari. Dari hasil ini sangat bermanfaat untuk kegiatan sosial di sekolah. 4) Infaq bulanan, menggunakan kotak infaq yang di bawa pulang. Setiap bulan peserta didik diberi kotak infaq, teknisnya kotak infaq kosong diberikan ke siswa tanggal 20, lalu dikumpulkan kembali ke sekolah tanggal 20 bulan berikutnya dalam kondisi sudah terisi sebarangpun, lalu diberikan kotak infaq kosong yang baru, jadi setok kotak dari sekolah 2 kali lipatnya, bagian refisi kotak sudah ada secara khusus rata-rata biaya perbaikan kotak Rp. 1000/kotak, kotak menggunakan pipa bekas gulungan kain atau banner dan sejenisnya yang terbuat dari kardus tebal, pendapatan dari kotak ini kurang lebih Rp. 5.000.000,00 /bulan. 5) Infaq sesuai kebutuhan sekolah.

Program ini dibuka ketika ada kebutuhan sekolah, seperti membangun ruang kelas, membangun masjid, pavingisasi, atau pembebasan tanah. 6) BOS pemerintah. BOS di SDIT Imam Syafii lebih difokuskan untuk kegiatan operasional sekolah dan pemenuhan sarpras pembelajaran seperti pengadaan LCD, alat peraga di kelas-kelas. Dan juga pembelian barang lainnya. BOS di SDIT Imam Sayfi'I sangat membantu jalannya kegiatan karena siswanya sudah tergolong gemuk di Kecamatan Petanahan. 7) Donatur tetap. Donatur tetap bertujuan untuk membantu operasional sekolah termasuk donatur tetap adalah adanya Orang tua asuh yang membiayai anak sampai selesai. Donatur tetap disini sifatnya jemput bola didatangi oleh petugas. Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Syafi'I sendiri termasuk sekolah swasta yang menerima BOS sekaligus meminta SPP dari orang tua siswa. Bagaimana Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Imam Syafi'i mengatasi kekurangan pembiayaan pendidikan tersebut? Kepala Sekolah menyatakan bahwa dana BOS itu baru mencukupi dana operasional rutin sekitar 15 % dari total kebutuhan rutin bulanan. Karena itu, Sekolah Dasar Islam Terpadu atas persetujuan Komite Sekolah setempat meminta SPP dari orang tua sebanyak

450.000/bulan. Uang itu untuk memenuhi 85 % kekurangan anggaran. Menurut keterangan Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Imam Syafi'i , dana yang terkumpul dari SPP dialokasikan sebagian besar untuk gaji/honor guru dan tenaga kependidikan, yaitu sekitar 70 %. Sisanya 30 % untuk mendukung kekurangan operasional rutin di luar gaji/honor sebagaimana item-item pembiayaan BOS yang direkomendasikan Kemdikbud, khususnya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.

PERMASALAHAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH SWASTA

Menghadapi kebijakan pendidikan gratis, setelah adanya kebijakan nasional pemberian bantuan operasional Sekolah (BOS), Sekolah swasta yang ingin mengejar keunggulan perlu punya strategi khusus untuk menjalankan proses belajar mengajarnya. Kebanyakan Sekolah Islam, karena dijiwai rasa ikhlasnya mengembangkan ilmu agama, banyak yang tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengikuti himbuan pemerintah untuk tidak memungut lagi biaya pendidikan dari siswa/orang tua siswa. Pilihan ini bukan tanpa konsekwensi, karena pembiayaan dari dana BOS masih lebih banyak fokus kepada kebutuhan siswa, sedang tenaga pendidik dan kependidikan belum mendapatkan apresiasi yang layak dan memadai. Karena itu bagi sekolah swasta yang ingin menggenjot kualitas pendidikan dan merebut minat masyarakat harus berani mengambil sikap tertentu. Ada beberapa pokok pikiran sekitar pembiayaan pendidikan di sekolah yang harus difikirkan bagi sekolah yang ingin merancang, membangun keberhasilan sekolahnya. Berikut beberapa bahasan penulis terhadap pokok-pokok pikiran di sekitar masalah tersebut, sekaligus bagaimana Sekolah Dasar Islam Terpadu mensikapi persoalan tersebut.

KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH

Untuk mengetahui kebutuhan pembiayaan pendidikan di Sekolah, kita perlu melihat secara komprehensif kebutuhan satuan pendidikan sekolah. Membaca komponen pembiayaan di sekolah, perlu dibedakan dengan melihat praktek di sekolah (umum), mengingat sekolah di Indonesia mayoritas adalah swasta. Kalau sekolah umum kebanyakan adalah sekolah negeri, dengan guru yang kebanyakan adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah gaji/honor yang standar; maka pada Sekolah yang kebanyakan adalah swasta, dan gurunya pun kebanyakan adalah swasta/honorer berimplikasi pada model pembiayaan pendidikan yang berbeda diantara keduanya.

Sebagaimana telah disebutkan dalam kerangka konseptual, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Sisdiknas no.20/2003 menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas tiga jenis biaya, yaitu: (1) biaya investasi, (2) biaya operasional, dan (3) biaya personal. Demikian juga PP nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Belajar dari kasus Sekolah Dasar Islam Terpadu, pengkaji di sini kemudian merasa perlu membuat beberapa skema pembiayaan pendidikan berdasarkan proses belajar mengajar (PBM). Skema diperlukan untuk menjadi dasar acuan sejauh mana kita menyelenggarakan layanan pendidikan sekolah. Untuk memudahkan pembaca, di sini pengkaji merumuskannya menjadi tiga model atau paket pembiayaan : a) paket

dasar; b) paket menengah; dan c) paket ekstra. Ketiga paket atau model itu bisa dijelaskan sebagai berikut :*Pertama,*

Paket Dasar yaitu merupakan paket pembiayaan minimal untuk berjalannya proses pembelajaran pada satuan pendidikan. Paket pembiayaan ini merupakan biaya operasional yang terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen gaji dan honor pendidik dan tenaga kependidikan (operasional gaji/honor), dan komponen peralatan habis pakai (operasional nongaji/honor). *Kedua,* Paket menengah Paket menengah merupakan paket tahap berikutnya dari pembiayaan pendidikan di sekolah, yaitu pembiayaan yang sudah mengkalkulasi dana investasi dalam pembiayaan pendidikan. Dana investasi merupakan penghitungan dana terhadap barang dan jasa yang nilai gunanya tidak sekali habis atau mempunyai rentang waktu yang lama. Biaya investasi dapat berupa pembiayaan untuk pengadaan sarana prasarana yang berjangka lama seperti ruang kelas baru (RKB); bisa juga yang terkait dengan pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) seperti guru menempuh pendidikan lanjut S2, S3 atau shortcourse tertentu; bisa juga biaya investasi ini berupa modal tetap seperti pengadaan tanah. Sumber pembiayaan paket ini dapat berasal dari pemerintah pusat, bantuan dari pemerintah daerah, dan sumbangan orang tua (masyarakat).*Ketiga,* Paket Ekstra, Paket Ekstra merupakan bentuk pembiayaan yang telah mampu membuka program-program khusus yang dilakukan di satuan pendidikan tertentu untuk menunjukkan nilai beda dengan satuan pendidikan lainnya.

Program khusus itu bisa jadi merupakan paket uji coba yang diinisiasi oleh pemerintah pusat (Kemendikbud), atau pemerintah daerah, atau oleh satuan pendidikan itu sendiri. Paket biaya ini bisa berupa pemacuan peningkatan mutu, pengembangan kekhasan satuan pendidikan. Sumber pembiayaan dapat berasal dari pihak inisiator seperti Kemendikbud, pemerintah daerah, atau orang tua siswa.

Komponen Operasional Rutin Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Imam Syafi'i

Penelitian ini selanjutnya difokuskan kepada pemetaan kebutuhan pembiayaan dasar pembelajaran (operasional) rutin, mengingat komponen ini merupakan roda utama pendidikan nasional yang dijalankan saat ini. biaya operasional, terdiri dari biaya gaji/honor dan biaya nongaji/honor. Biaya gaji/honor terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan - tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya non gaji/honor adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi. Untuk mengetahui konstruksi biaya pendidikan di sekolah, kita perlu mengetahui komponen pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut. Penelitian Puslitbang Penda(2006)

tentang “studi Unit cost satuan pendidikan di Madrasah Swasta” yang dilakukan Puslitbang pendidikan agama dan keagamaan kementerian Agama RI bekerja Sama dengan Peneliti Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pernah menyebutkan Komponen-komponen pembiayaan yang seharusnya dibiayai dalam penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah swasta tingkat MI dan MTS agar memiliki kualitas dan daya saing dengan jenis-jenis pendidikan persekolahan lainnya.

Daftar kebutuhan tersebut terdiri dari tujuh komponen utama dan 57 rincian. Ketujuh komponen itu terdiri dari: 1) Komponen Kesejahteraan Personel; 2) Komponen Pengembangan Personel; 3) Komponen Penunjang KBM; 4) Komponen Pemeliharaan dan Penggantian; 5) Komponen Daya dan jasa; 6) Komponen Pembinaan Kesiswaan; 7) Komponen rumahtangga Sekolah (overhead). Ketujuh komponen itu, secara ideal untuk mewujudkan pendidikan yang memadai perlu dipenuhi. namun karena dunia Sekolah Islam umumnya mempunyai dana yang terbatas, maka penulis mencoba melacak kebutuhan pembiayaan dengan formula yang lebih minimal. Dari kajian peneliti (2011), pengkaji menemukan diantara Sekolah Islam ternyata masing- masing Sekolah Islam mempunyai kebijakan masing masing. Perbedaan menyolok antara Sekolah Islam swasta dan Sekolah Islam negeri terjadi pada alokasi honor pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau di Sekolah Islam swasta dari total dana bantuan pemerintah melalui BOS, terserap paling banyak pada belanja pegawai, berkebalikan dengan madrasah negeri yang tidak terbebani belanja pegawai. Untuk memperjelas rumusan komponen utama dan prosentase pembiayaan untuk masing-masing komponen yang dibutuhkan dalam pembiayaan pendidikan di Sekolah Islam secara minimal, penulis berkesempatan melakukan Forum group Discussion (FgD), di Kanwil makassar, yang dihadiri paraperwakilan mapenda Kabupaten dan provinsi. FgD ini memperoleh simpulan bahwa ada 7 (tujuh) pokok pembiayaan pendidikan Sekolah Islam, yang wajib dialokasikan atau dibiayai. Ketujuh pokok itu adalah : 1) honor guru; 2) Pengadaan buku pelajaran/perpustakaan; 3) Alat tulis kelas; 4) Peralatan siswa; 5) Sumber Daya dan jasa; 6) Ujian; dan 7) biaya rutin operasional. Dari item-item yang telah dianggap pokok itu, didapatkan jumlah prosentasea lokasi yang merupakan kompromi yang dihasilkan dari FgD tersebut. Diskusi yang melibatkan kepala Sekolah Islam swasta dan negeri di lingkungan kota makassar menghasilkan selain pokok-pokok yang wajib dibiayai sekaligus prosentase pembiayaan. Pada Sekolah Islam swasta kebutuhan pembiayaan yang paling besar adalah honor guru yaitu diusulkan 50). Dari skala prosentase dapat diurutkan sebagai berikut: belanja pegawai (50%), pengadaan buku, langganan daya dan jasa, uang ujian, dana operasional (masing-masing 10 %), peralatan siswa dan peralatan kelas (masing-masing 5 %).

Kalau dikembalikan dengan kebijakan pendidikan nasional saat ini, keberadaan dana BOS sejauh ini baru dapat membantu kelompok pembiayaan operasional. Itu artinya untuk kepentingan pembiayaan secara utuh, khususnya untuk Sekolah Islam swasta, masih membutuhkan sumber penganggaran lain. Apalagi dalam pembiayaan pendidikan dikenal beberapa kebutuhan pembiayaan khusus seperti pembiayaan investasi, pengembangan mutu, dan kemungkinan pengembangan kekhasan Sekolah Islam.

Menghitung Gaji/Honor Guru Sekolah Dasar Islam(Versi UMP)

Sekalipun prosentase penyerapan untuk biaya gaji/honor di beberapa Sekolah Dasar Islam Swasta cukup besar, pertanyaannya: sudahkah cukup honor/gaji guru? Lebih ekstrimnya lagi, bila dianalogikan pendapatan minimal buruh, sudahkah guru swasta pada Sekolah Dasar Islam swasta telah mampu mencapai Upah Minimum Provinsi (UMP). Dasar UMP menjadi penting, mengingat UMP adalah standar hidup minimal yang telah dijadikan ukuran bagi pemerintah daerah. Untuk mengukur biaya gaji/honor yang sepatasnya diterima guru di daerah adalah dengan melihat Upah Minimum Provinsi(UMP).

Ketika saya ajukan pemikiran bahwa gaji/honor guru minimal adalah sama dengan UMP kepada teman-teman yang bergerak di dunia pendidikan terdapat dua respon. Pertama, menyamakan standar guru sekolah swasta dengan UMP adalah tidak manusiawi, mengingat UMP sebenarnya disediakan hanya untuk tenaga kerja kasar, buruh dan kebanyakan lulusan SMA dan tidak mempunyai skills sebagaimana guru. Guru sebaiknya di atas UMP. Kedua, ada yang tertarik juga untuk minimal mempersamakan gaji guru paling tidak sama dengan UMP.

Membandingkan gaji/honor guru Sekolah Dasar Islam swasta dengan Upah Minimum Provinsi(UMP) sudah waktunya kita lakukan, mengingat banyak praktek satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang belum bisa memberikan kesejahteraan guru di atas UMP yang diterima buruh atau pekerja pabrik. bukankah guru adalah agen utama perubahan yang menghasilkan calon pemimpin bangsa, calon pengusaha, dan tentunya calon-calon buruh atau pekerja industri. Kelalaian kita meningkatkan kesejahteraan guru minimal sama atau justru di atas UMP menjadi keprihatinan besar kita. hal itu menunjukkan bahwa kita belum menghargai profesi guru, atau masyarakat kita belum menghargai guru, pemerintahdaerah kita juga belum memperhatikan nasib guru dan lebih jauh lagi negara belum bisa mensejahterakan guru.

Berangkat dari fakta seperti itu, pada tahun 2022 penulis pernah menelusuri UMP di berbagai daerah yang penulis jadikan sampel untuk membandingkan gaji/honor guru dengan UMP per daerah. Menurut Data Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi tahun 2022 dinyatakan bahwa besar upah minimum provinsi pada

keenam sasaran yang kami teliti, yaitu di Banten, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Jawa Barat dapat dilihat dalam tabel berikut:

matriks 4

Daftar Upah minimum Provinsi (UmP)
Daerah Sasaran Penelitian, tahun 2022

Provinsi Besar	UMP
Banten	Rp 2.501.203,11
Lampung	Rp 2.440.486,18
Kalimantan Tengah	Rp 2.922.516,-
Sulawesi Selatan	Rp 3.165.876,-
Sumatera Selatan	Rp 3.144.446,-
Jawa Tengah	Rp 1.812.935,-

Idealnya, gaji/honor pendidik dan tenaga kependidikan sekolah swasta sudah memenuhi standar Upah Minimum Provinsi (UMP) masing-masing daerah. Apabila honor guru telah sama atau melebihi UMP maka, sewajarnya apabila masyarakat berhak mendapatkan layanan pendidikan yang memadai. Namun, seperti ituukah penerimaan guru Sekolah Dasar Islam swasta / Madrasah Swasta di tanah air? Tentu saja tidak, terbukti bahwa gaji atau honor guru yang ada di sekolah SDIT Imam Syafi'i Petanahan, Kebumen masih belum memenuhi standar UPM yang ada di Daerah tersebut yaitu rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- /Guru. Artinya secara umum, UMP pada Sekolah Dasar Islam swasta (sampel) belum terpenuhi. SDIT Imam Syafi'i dengan model pembiayaan yang diterapkan sejauh ini, akan mampu menggaji guru dan tenaga kependidikan di atas UMP Provinsi Jawa Tengah serta mampu bersaing dengan sekolah lainnya yang berada di daerah tersebut. Muncul kesan bahwa di sana sudah hadir sebuah sekolah dengan sarana-prasarana yang lengkap yang layak menggaet peserta didik dari semua lapisan masyarakat. Berbeda dengan kebanyakan Sekolah Swasta lainnya di tanah air yang memiliki masyarakat pendukung yang biasanya dari kelas masyarakat bawah, SDIT Imam Syafi'i berhasil membuktikan diri bahwa Sekolah Dasar Islam swasta juga bisa menjadi sekolah dengan fasilitas yang memadai yang layak diminati oleh masyarakat kelas menengah atas.

SIMPULAN

Dari paparan tentang strategi Pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar Islam Swasta, dapat digaris bawahi beberapa kesimpulan berikut: Pertama, terhadap kebijakan pemerintah yang menghimbau pendidikan gratis, sebagai konsekuensi penerimaan

dana BOS, maka dunia Sekolah Dasar Islam Swasta terbelah menjadi dua: a) sebagian besar sekolah menerima dana BOS dan menggratiskan anak didik dari biaya pendidikan. walaupun konsekwensi dari sikap ini sekolah masih mengabaikan kehidupan layak dari pendidik dan tenaga kependidikannya; dan b) menerima dana BOS, namun tidak menggratiskan siswa dari biaya tambahan, dengan pertimbangan bahwa sekolah tidak cukup dengan dana yang tersedia dari dana BOS. Kedua, SDIT Imam Syafi'i Petanahan Kebumen sebagai kasus studi ini termasuk kelompok sekolah jenis kedua, yaitu menerima dana BOS dan menarik biaya pendidikan dari siswa/orang tua siswa. bahkan dari jenis biaya tambahannya di sekolah ini terdapat beberapa dana tambahan, yaitu Daftar Ulang Siswa, SPP bulanan, Infaq setiap hari senin, Infaq bulanan, Infaq sesuai kebutuhan sekolah, BOS, donatur tetap, Uang tahun ajaran baru. Dengan beberapa dana tambahan ini, bukannya lembaga sekolah ini dijauhi para konsumen. Justru sebaliknya sekolah ini tetap diminati masyarakat, khususnya dari semua kalangan. Ketiga, strategi pembiayaan pendidikan di sekolah hendaknya mengacu pada jaminan apa yang bisa diberikan satuan pendidikan kepada konsumen. Kalau konsumen merasa mendapatkan kepastian jaminan dengan program-programnya, makasudnya dapat dipastikan konsumen sanggup menanggung biaya yang dibutuhkan. Di sini letak strategis Komite Sekolah diperankan untuk membaca kemauan publik terhadap layanan pendidikan sekolah. Penelitian ini merekomendasikan: pertama, perlunya satuan pendidikan Sekolah Dasar Islam swasta mengidentifikasi jaminan mutu sekolahnya dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat; kedua, birokrasi pendidikan di lingkungan kementerian pendidikan perlu memetakan sekolah-sekolah dengan tipe dasar, menengah atau ekstra (unggul). Peta ini diperlukan untuk kepentingan pembinaan. Ketiga, perlu dipikirkan gaji/honor pendidik dan tenaga kependidikan dengan kriteria dan syarat tertentu untuk mendapatkan hidup yang layak dari pengabdianya sebagai guru atau tenaga pendidik di lingkungan Sekolah Dasar Islam swasta.

Daftar Pustaka

Supriadi, Dedi (2003): *Satuan Biaya Pendidikan: Dasar dan Menengah*, Bandung, Pt remajaRosdakarya

mastuhu. (2006): Pendidikan Agama Islam Indonesia Sebagai Subsistem Pendidikan nasional. *Jurnal Edukasia*, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Dep. Agama RI, edisi 1.

mulyana, rochmat dkk. (2005): *Unit Cost Mahasiswa IAIN/STAIN*, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Penelitian Puslitbang Penda. (2006): *Studi Unit Cost Satuan Pendidikan dimadrasah Swasta*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

muin, Abdul dkk. (2007): *Biaya Satuan Madrasah Diniyah Awaliyah (2007)*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

murtadlo dkk. (2011): *dalam Studi Pembiayaan Pendidikan di madrasah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Pendidikan Agama Islam dalam Kemunduran, (Suara merdeka, 10 Januari 2005) Paparan Dirjend. Penda pada dengar pendapat Komisi VIII DPR RI, Januari. buku Penuntasan wajar Dikdas Sembilantahun 2004-2009, Direktorat Pendidikan madrasah)

Daftar Upah minimum Provinsi 2022 Seluruh Provinsi di Indonesia. <http://berita.manadotoday.com/> (ditelusuri tgl 11 September 2011).